

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Teori yang dijadikan dasar dalam menjelaskan pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Persistensi Laba adalah sebagai berikut:

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, *et al.* (2010) dalam Dwi Martani, dkk (2012:4) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu sistem dengan input data/ informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Sebagai sistem, akuntansi terdiri dari atas input yaitu transaksi, proses yaitu kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa laporan keuangan”.

Menurut Dwi Martani, dkk (2012:4) berdasarkan pengertian diatas, pengertian akuntansi terdiri atas empat hal penting, sebagai berikut:

1. Input

Input (masukan) adalah transaksi yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada

bukti yang menyertainya. Tanpa ada bukti yang autentik, maka suatu transaksi tidak dapat dicatat dan dibukukan oleh akuntansi.

2. Proses

Proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan.

3. Output

Output (keluaran) akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi menurut standar akuntansi keuangan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

4. Pengguna Informasi Keuangan

Pengguna Informasi Keuangan adalah pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi terdiri dari dua yaitu pihak internal dan eksternal.

Sedangkan Walter T. Harrison Jr, *et al* (2012: 3) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”.

Berdasarkan pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengolah data transaksi dari input kemudian diproses hingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan yang digunakan pihak internal maupun eksternal sebagai dasar pengambilan suatu keputusan.

2.1.1.2 Akuntansi Keuangan

Menurut Kieso, *et al.* (2011:2) pengertian akuntansi keuangan (*financial accounting*) merupakan sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal.

Sedangkan menurut Dwi Martani (2012:8), Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan.

Adapun menurut Walter T. Harrison Jr, *et al* (2012:4) akuntansi keuangan (*financial accounting*) menyediakan informasi bagi pengambil keputusan di luar entitas, seperti investor, kreditor, agen pemerintahan, dan publik.

Berdasarkan pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa akuntansi keuangan adalah proses pembuatan laporan keuangan yang diorientasikan untuk pengguna pihak eksternal dengan menggunakan prinsip serta asumsi dalam penyusunan laporan keuangan.

2.1.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 (revisi 2009) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Secara umum tujuan laporan keuangan untuk:

1. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entita yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
4. Menyediakan pengaruh keuangan di masa lalu.

Berdasarkan pengertian diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan dalam membuat suatu keputusan ekonomi serta memperlihatkan tanggungjawab dari manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan.

2.1.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan mempunyai hubungan yang erat dengan *corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Tri Junawatiningsih & Puji Harto (2014) hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agen*) dengan investor (*principal*) yang mempunyai kepentingan saling bertentangan. Terjadinya konflik kepentingan antara agen dengan *principal* karena agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2013:65) *Agency theory* (teori keagenan) adalah:

“merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal sebagai *principal* membangun suatu kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal”.

Menurut Eisenhardt (1989:2) dalam Taman dan Nugroho (2011) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)

Sifat-sifat dasar manusia ini yang dapat menjadi pemicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan atas dasar untuk mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan pihak lain serta apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pihak agen menguasai informasi secara sangat maksimal (*full information*) dan di sisi lain pihak *principal* memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) atau maksimalitas kekuasaan. Sehingga kedua pihak ini sama-sama memiliki kepentingan pribadi dalam setiap keputusan yang diambil, salah satu efek yang jauh bisa terjadi adalah perolehan dividen yang rendah yang akan diterima oleh *principal* karena faktor permainan yang dilakukan oleh agen. (Irham Fahmi, 2013:66)

Kepentingan yang saling bertentangan ini menjadi penyebab timbulnya terjadinya kecurangan. Menurut Aliva dkk, (2011) dalam Tri Junawatiningsih & Puji Harto (2014) kecurangan pada perusahaan diibaratkan dengan istilah segitiga penyebab kecurangan (*fraud triangle*) yang terdiri dari kesempatan, tekanan dan rasionalisasi. Pengelola perusahaan yang menyusun laporan keuangan memiliki kesempatan memanfaatkan adanya asimetri informasi ini, termasuk juga memiliki pengaruh besar untuk menentukan kebijakan akuntansi yang menguntungkan. Disamping itu, tekanan pemegang saham terhadap pengelola perusahaan atau perjanjian bonus yang memungkinkan pengelola perusahaan mendapatkan sejumlah bonus jika memenuhi laba tertentu. Aspek ini sangatlah dominan mempengaruhi laba yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa teori agensi merupakan kontrak antara manajer sebagai agen dengan investor (*principal*) yang memiliki perbedaan kepentingan.

2.1.3 Corporate Governance

2.1.3.1 Pengertian Corporate Governance

Corporate governance timbul dari adanya masalah keagenan (*agency problem*) yang merupakan suatu konflik akibat perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Pemegang saham selaku orang yang berkepentingan memerlukan suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik

sehingga dapat dijadikan kontrol pengawasan terhadap kinerja operasional oleh manajer perusahaan (Tri Junawatiningsih & Puji Harto, 2014).

Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh Cardbury Committee, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cardbury Report*. Pengertian *corporate governance* dari *Cardbury Committee of United Kingdom* dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2017:101) yang apabila diterjemahkan adalah:

“... Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Adapun *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang pada tahun 1999 menerbitkan *Principle of corporate Governance* yang menjelaskan tata kelola perusahaan (*corporate governace*) dalam lebih rinci, yang apabila diiterjemahkan adalah sebagai berikut:

“Cara internal dimana perusahaan diopersikan dan dikendalikan [...] yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham dan stakeholder lainnya. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur yang melaluinya tujuan perusahaan ditetapkan, dan sarana untuk mencapai tujuan dan kinerja pemantauan tersebut ditentukan. Tata kelola perusahaan yang baik harus memeberikan insentif yang tepat bagi dewan direksi dan manajemen untuk mengejar tujuan yang menjadi kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya lebih banyak efisien”.

Sedangkan menurut Adrian Sutedi (2012:1) *good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“*good corporate governance* yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisari/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan dalam mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kepentingan pihak internal dan eksternal demi tercapainya tujuan perusahaan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Menurut Adrian Sutedi (2012:10) ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance*, adalah sebagai berikut :

1. Transparansi

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Intinya perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan. Pengurangan dari kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*creative accounting*), pengakuan pajak yang salah dan penerapan dari prinsip-prinsip pelaporan yang cacat, keseluruhannya adalah masalah krusial untuk meyakinkan bahwa pengelolaan perusahaan dapat dipertahankan (*sustainable*).

2. Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*)

Pengelolaan perusahaan didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3. Kejujuran (*Fairness*)

Prinsip ketiga dari pengelolaan perusahaan penekanan pada kejujuran, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dan aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

4. *Sustainability*

Ketika perusahaan Negara (*corporation*) *exist* dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, maka perusahaan harus memperhatikan kebutuhan pegawai dan komunitasnya serta tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi warga *corporate* yang baik. Dengan demikian akan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi *stakeholder*-nya.

Sedangkan menurut Tri Budiyono dalam Marisi P.Purba (2012:24), *Good*

Corporate Governance memiliki 5 (lima) pilar atau prinsip-prinsip, yaitu:

1. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran adalah perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para *stakeholder* yang timbul dari perjanjian peraturan perundang-undangan.

2. Transparansi (*transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan relevan dengan perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terselenggara dengan efektif.

5. Independensi (*independence*)

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat”.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sampai pada pemahaman penulis bahwa untuk melaksanakan *corporate governance* diperlukannya transparansi dalam penyampaian informasi ataupun keputusan, akuntabilitas dalam kejelasan dalam pengelolaan perusahaan, pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan yang sehat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, independensi secara profesional tanpa benturan kepentingan, dan kewajaran dalam berlaku adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para *stakeholder*.

2.1.3.3 Tujuan *Corporate Governance*

Menurut Indra Surya (2006) dalam Muh. Arief Effendi (2016:8) penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006) maksud dan tujuan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa tujuan *corporate governance* adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam akses investasi, *cost capital* yang murah, mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta membantu membuat keputusan ekonomi yang lebih baik.

2.1.3.4 Unsur-Unsur *Corporate Governance*

Menurut Adrian Sutedi (2012: 41) terdapat unsur-unsur *corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan (dan selalu diperlukan di dalam

perusahaan) serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan di luar perusahaan).

1. *Corporate Governance-Internal Perusahaan*

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, dinamakan *Corporate Governance-Internal Perusahaan*. Unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham;
- b. Direksi;
- c. Dewan Komisaris;
- d. Manajer;
- e. Karyawan/ Serikat Pekerja;
- f. Sistem remunerasi berdasar kinerja;
- g. Komite Audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

- a. Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*);
- b. Transparansi;
- c. *Accountability*;
- d. *Fairness*;
- e. Aturan dari *code of conduct*.

2. *Corporate Governance-Eksternal Perusahaan*

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang diperlukan di luar perusahaan, dinamakan *Corporate Governance-Eksternal Perusahaan*. unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Kecukupan Undang-Undang dan perangkat hukum;
- b. Investor;
- c. Institusi penyedia informasi;
- d. Akuntan Publik;
- e. Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- f. Pemberi pinjaman;
- g. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- a. Aturan dari *code of conduct*;
- b. *Fairness*;
- c. *Accountability*;
- d. Jaminan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, sampai pada pemahaman penulis, bahwa unsur *corporate governance* terdiri dari internal seperti manajemen dan eksternal seperti investor dan undang-undang yang mengatur serta unsur lainnya yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.3.5 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control atau pengawasan terhadap keputusan.

Mekanisme *corporate governance* mencakup berbagai aspek seperti kontrak dan fungsi pemantauan auditor eksternal independen dalam mengontefikasi laporan keuangan dan memantau keberadaan pemegang saham institusional. Ukuran dari mekanisme ini adalah seberapa efektif mereka mengurangi konflik agensi antara pemilik dengan direktur. Kualitas tata kelola perusahaan didefinisikan bersama dengan aspek multidimensional kontrol manajerial (Bita Mashayekhi dan Mohammad S. Bazaz, 2010).

Selain itu mekanisme *corporate governance* diyakini dapat membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, meningkatkan kebenaran informasi akuntansi dan keuangan, dan memastikan intergritas proses pelaporan keuangan (Cohen *et al*, 2005; Hasim & Devi,2007 dalam Redhwan Ahmed al-Dhamari dan Ku Nor Izah Ku Ismail, 2013).

Menurut Nasution dan Setiawan dalam Mochammad Ridwan dan Ardi Gunardi (2013) mekanisme *corporate governance* adalah:

“Konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.”

Dengan adanya mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat membantu mengatasi konflik keagenan antara pihak agen dengan *principal*, sehingga pihak agen dapat mengelola perusahaan dengan baik, yaitu misalnya tidak berfikir untuk mementingkan diri sendiri tetapi mementingkan pihak *principal* serta baiknya untuk perusahaan. Sehingga hal yang diharapkan seperti laporan keuangan akan tersaji tanpa adanya manipulasi atau kecurang-kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Informasi yang akan didapatkan dari laporan keuangan relevan dan dapat dipercaya, yang berdampak kepada pengambilan keputusan yang lebih baik bagi perusahaan.

Menurut Tri Junawatiningsih (2014) mekanisme *corporate governance* terbagi menjadi kedua bagian yaitu mekanisme internal (konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, dan komite audit) dan mekanisme eksternal (audit *tenure*, *leverage*, dan spesialisasi auditor)

Sedangkan menurut Redhwan Ahmed al-Dhamari dan Ku Nor Izah Ku Ismail (2013) mekanisme *corporate governance* dalam penelitiannya diukur melalui *board independence*, *board size*, *board leadership*, *audit committee*

independence, audit committee meetings, audit committee competency, institutional ownership and managerial ownership

Adapun menurut Muhammad Khafid (2012) dalam penelitiannya mekanisme *corporate governance* diukur dengan komposisi dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit

Pada penelitian ini ukuran mekanisme *corporate governance* yang diteliti melihat dari penelitian Muhammad Khafid (2012) yaitu mengukur dengan komposisi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

2.1.3.6 Komposisi Dewan Komisaris Independen

2.1.3.6.1 Pengertian Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2017:110) adalah:

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Menurut Bayu (2010) dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris

lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan”.

Komisaris independen dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni pada Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), yang berisi sebagai berikut:

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1(satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak berafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, diantaranya adalah Komisaris Independen. Selain itu Komisaris Independen wajib paling kurang 30 persen dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan pengertian diatas, sampai pada pemahaman penulis dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris berdasarkan keputusan RUPS yang tidak berafiliasi dengan manajemen yang bertindak secara independen tanpa pengaruh pihak-pihak lain, semata-mata bertugas hanya untuk kepentingan perusahaan.

2.1.3.6.2 Pengukuran Komposisi Dewan Komisaris Independen

Pengukuran komposisi dewan komisaris independen menurut Muhammad Khafid (2012) adalah sebagai berikut:

$$\text{KDKI} = \frac{\Sigma \text{anggota dewan komisaris independen}}{\Sigma \text{seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Keterangan:

KDKI: Komposisi Dewan Komisaris Independen

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui persentase komposisi dewan komisaris independen dengan membandingkan jumlah anggota dewan komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan.

Komposisi dewan komisaris sangat penting, karena hal ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penyajian informasi yang diberikan perusahaan, apakah informasi tersebut telah dimodifikasi atau memang murni apa adanya (Briliana Kusuma dan R. Arja Sadijarto, 2014)

Pada penelitian ini mekanisme *corporate governance* menggunakan pengukuran komposisi dewan komisaris independen karena dewan komisaris independen mengelola perusahaan tanpa terikat dengan pihak-pihak manapun, dewan komisaris semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan. Maka dari itu pencerminan dari tata kelola perusahaan yang baik adalah salah satunya dengan adanya dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Publik, Komisaris Independen wajib paling kurang 30 persen dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

2.1.3.7 Komite Audit

2.1.3.7.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pengertian Komite Audit adalah sebagai berikut:

” Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik”.

Pada dasarnya komite audit juga memainkan peranan penting dalam berusaha memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pemegang saham (Satya Sarawana dan Nicken Destriana, 2015).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* (2006) komite audit adalah sebagai berikut

1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:
 - a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip skuntansi yang berlaku umum.
 - b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
 - c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

- d. Tindak lanjut temuan hasil audit harus dilaksanakan oleh manajemen.
2. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
3. Jumlah komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu dewan komisaris melaksanakan tugasnya.

2.1.3.7.2 Pengukuran Komite Audit

Pengukuran komite audit menurut Muhammad Khafid (2012) yaitu:

$KA = \text{jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan}$

Keterangan:

KA: Komite Audit

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan.

Pada penelitian ini mekanisme *corporate governance* diukur melalui komite audit. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 4 menyatakan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.3.8 Kepemilikan Institusional

2.1.3.8.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

Menurut Lang dan McNichols (1997) dalam Tri Junawatiningsih (2014) kepemilikan institusional adalah investor besar yang menerapkan kebijaksanaan atas investasi dari orang lain. Kepemilikan institusional dapat dikatakan sebagai kepemilikan saham oleh institusi berbadan hukum. Investor institusional memberikan peran yang cukup besar dalam pengendalian perusahaan. Ketika perusahaan membutuhkan modal dana untuk kegiatan bisnis operasi perusahaan dari investor institusional. Investor institusional lantas tidak begitu saja percaya memberikan pinjaman dana kepada suatu perusahaan tersebut, akan tetapi dilakukan pencermatan terlebih dahulu untuk perusahaan yang akan dipinjami dan mengenai bagaimana prospek perusahaan tersebut kedepannya.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusi (Muhammad Khafid, 2012). Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik.

Sedangkan menurut Tarjo (2008) dalam Dwi Sukirni (2012), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga.

2.1.3.8.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Pengukuran kepemilikan institusional menurut penelitian Muhammad Khafid (2012) yaitu:

$$KI = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki oleh institusi}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

KI: Kepemilikan Institusional

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui persentase kepemilikan institusional dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki institusi dengan total saham yang beredar.

Pada penelitian ini mekanisme *corporate governance* menggunakan pengukuran kepemilikan institusional karena kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam pengawasan kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional

sebagai pengendalian perusahaan dalam memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba tanpa adanya manipulasi.

Menurut Bushee (1998) dalam Afid Nurrochman dan Badigantus Solikhah (2015) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens.

2.1.3.9 Kepemilikan Manajerial

2.1.3.9.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial

Menurut Muhammad Khafid (2012) pengertian adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen maupun direktur perusahaan”.

Sedangkan menurut Dowes dan Goodman (1999) dalam Dwi Sukirni (2012) kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

“Para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan”.

Berdasarkan pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan.

2.1.3.9.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Pengukuran kepemilikan institusional menurut Muhammad Khafid (2012) yaitu:

$$KM = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki oleh manajemen atau direktur}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

KM: Kepemilikan Manajerial

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui persentase kepemilikan manajerial dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki manajemen dengan total saham yang beredar.

Pada penelitian ini mekanisme *corporate governance* diukur dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dianggap sebagai perangkat struktur kepemilikan yang mengurangi konflik antara manajer dengan pemegang saham. Selain itu, memiliki saham yang besar oleh manajer perusahaan akan mengurangi masalah moral dan mengurangi probabilitas untuk melakukan tindakan

yang tidak optimal oleh manajer (Jensen & Meckling, 1976 dalam Al-Dhamari & Ismail, 2013).

2.1.4 Kualitas Audit

2.1.4.1 Pengertian Auditing

Menurut Sukrisno Agoes (2016:4) pengertian auditing adalah sebagai berikut:

”Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011) dalam Sukrisno Agoes (2016:3) Auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of corresponden between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Adapun menurut Konrath (2002:5) dalam Sukrisno Agoes (2016:2) pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dari pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa auditing merupakan pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen untuk dilihat laporan yang diberikan sesuai dengan bukti-bukti pendukungnya dan dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.4.2 Standar Auditing

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) dalam Sukrisno Agoes (2016:31) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya profesionalnya dengan cermat dan saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
 - b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor (IAPI, 2011:150.1 & 150.2).

2.1.4.3 Pengertian Kualitas Audit

Rendal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dalam Amir Abadi

(2011:47) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Menurut Dodik Jualiardi (2013) pengertian kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Kualitas audit adalah ukuran yang menunjukkan adanya tingkat kompetensi dan independensi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengaudit laporan keuangan yang diperiksanya sehingga dapat memberikan suatu keyakinan atas pendapat yang telah dikeluarkan dan dapat memberikan suatu jaminan atas reliabilitas dan kualitas angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan”.

Sedangkan De Angelo (1981) dalam Erni Marsella (2012) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas ini merupakan probabilitas yang dinilai atau dipersepsikan oleh pasar (*market-assessed*), sehingga kualitas audit yang dimaksud dengan kualitas audit yang diukur dari persepsi pengguna laporan keuangan tentang kualitas auditor. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa ukuran auditor sangat menentukan kualitas audit yang dinilai oleh pasar tersebut.

Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit adalah jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan yang sudah diaudit. Sedangkan menurut auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai dengan standar professional yang ada, dapat menilai risiko bisnis klien dengan tujuan untuk meminimalisasikan ketidakpuasan klien dan menjaga reputasi auditor. (Clinton Marshal Panjaitan, 2014).

Berdasarkan pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa kualitas audit merupakan suatu ukuran yang menunjukkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang menghasilkan pendapat yang dapat memberikan suatu jaminan atas reliabilitas dan kualitas angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan.

2.1.4.4 Pengukuran Kualitas Audit

DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. Reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan, ketika kantor akuntan yang bereputasi yang baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. (Cameran, 2005 dalam Eli Suhayati, 2012). Selain itu auditor yang bekerja pada KAP besar dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang reputasinya kurang baik. (Eli Suhayati 2012).

Perusahaan menggunakan jasa KAP dalam melaksanakan pekerjaan audit terhadap laporan keuangan agar informasi yang disampaikan kepada pihak internal maupun eksternal akurat dan terpercaya. Untuk menjamin kredibilitas laporan keuangan tersebut perusahaan cenderung menggunakan jasa KAP yang memiliki reputasi atau nama yang baik.

KAP besar (*Big 4 accounting firms*) diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*Non-Big 4 accounting firms*). Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional terhadap klien karena mereka kurang bergantung dengan klien. Dalam penelitian ini pengukuran kualitas audit menurut pada penelitian Dodik Juliardi (2013) menggunakan ukuran KAP dengan rumus sebagai berikut:

KAD (Variabel dummy)

KAP Big 4 = 1

KAP non Big 4 = 0

Keterangan:

KAD = Kualitas Audit

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur berdasarkan ukuran KAP dengan menggunakan kelompok auditor *Big 4* diberi nilai 1, sedangkan KAP non *Big 4* diberi nilai 0. Empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *The Big 4 Auditors* yaitu:

1. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berafiliasi dengan *Pricewaterhouse Coopers*
2. KAP Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan *Ernst & Young*
3. KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*
4. KAP Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*

2.1.5 Persistensi Laba

2.1.5.1 Pengertian Laba

Setiap perusahaan *profit oriented* menginginkan laba atau keuntungan untuk dapat terus bertahan dalam perekonomian serta demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Pengertian laba menurut M.Nafarin (2013:788) adalah:

“Laba (*income*) adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu”.

Dwi Martani (2012:113) menyatakan bahwa pengertian laba merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial (uang) dari asset neto pada akhir periode (di luar distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi asset neto pada awal periode.

Laba digunakan sebagai ukuran kinerja dan dasar bagi ukuran kinerja investasi (*return on investment*) atau kinerja saham dengan melihat laba per saham (*earning per share*) (Dwi Martani, dkk. 2012: 43). Informasi kinerja perusahaan yang tercermin pada informasi laba di laporan laba rugi komprehensif merupakan informasi yang penting dilihat oleh investor dalam pengambilan keputusan mengenai investasi atau kredit, dan juga informasi untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan (Dwi Martani, 2012: 113).

Berdasarkan pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa laba merupakan keuntungan dari selisih pendapatan dikurangi beban dan hal

lainnya, yang dapat menjadi pengukur kinerja perusahaan serta membantu dalam kelangsungan hidup perusahaan.

2.1.5.2 Pengertian Persistensi Laba

Menurut Afid Nurocman dan Badigantus Solikhah (2015) pengertian persistensi laba adalah sebagai berikut:

“Persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada pandangan bahwa laba yang lebih *sustainable* adalah laba yang memiliki kualitas yang lebih baik”.

Menurut K.R. Subramanyam dan John J. Wild (2010:326) pengertian definisi daya tahan laba (*earning persistence*) secara luas mencakup stabilitas, prediksi, variabilitas dan tren laba.

Menurut Penman (2001) dalam Zaenal Fanani (2010) bahwa laba yang persisten adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan.

Sedangkan menurut Chandarin (2003) dalam Zaenal Fanani (2010) bahwa laba yang persisten adalah sebagai berikut:

“Laba akuntansi yang memiliki sedikit atau tidak mengandung gangguan (*noise*), dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Adapun Aulia Eka Persada dan Dwi Martani (2010) mendefinisikan persistensi laba adalah sebagai berikut:

“Persistensi laba adalah kemungkinan laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang (*expected future earnings*) yang tercermin pada laba tahun berjalan (*current earnings*). Semakin tinggi kemungkinan laba akuntansi di masa depan yang tercermin dari laba tahun berjalan, maka laba memiliki persistensi yang tinggi.

Laba persisten menggambarkan kualitas laba yang diperoleh perusahaan karena perusahaan dapat mempertahankan perolehan laba tersebut dari waktu ke waktu dan bukan karena suatu peristiwa tertentu (Dodik Juliardi, 2013).

Berdasarkan pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa persistensi laba merupakan laba yang dapat bertahan dilihat dari laba tahun berjalan yang stabil, sehingga laba tersebut dapat mencerminkan kinerja perusahaan dimasa sekerang dan juga dimasa yang akan datang.

2.1.5.3 Pengukuran Persistensi Laba

Menurut Muhammad Khafid (2012) persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada pandangan bahwa laba yang lebih sustainable adalah laba yang memiliki kualitas yang lebih baik. Pengukuran persistensi laba yang digunakan menggunakan koefisien regresi dari *earning per share* periode yang lalu terhadap *earning per share* periode sekarang.

Sedangkan menurut Tri Junawatiningsih (2014) persistensi laba menggambarkan koefisien dari regresi pendapatan operasional sekarang terhadap pendapatan operasional tahun sebelumnya. Hasil koefisien regresi tinggi

(mendekati angka 1) maka hal ini menunjukkan persistensi laba dan apabila sebaliknya (koefisien regresi mendekati nol) persistensi laba dikatakan rendah. Jika koefisien bernilai negatif, hal ini mengartikan hasil sebaliknya. Negatif mendekati angka 1 maka persistensi laba rendah, sedangkan negative mendekati angka nol menunjukkan tingginya persistensi laba. Pengukuran persistensi laba menurut Tri Junawatiningsih (2014) adalah sebagai berikut:

$$PO = \beta_0 + \beta_1 PO_{t-1} + \varepsilon$$

Keterangan:

PO = Laba operasional perusahaan tahun t

β_1 = Koefisien regresi persistensi laba

ε = Residual error

PO_{t-1} = Laba operasional perusahaan tahun t-1

Pengukuran persistensi laba diprosikan dengan nilai koefisien regresi antara laba operasional periode sekarang dengan laba operasional periode yang lalu yang selanjutnya dikalikan dengan logaritma natural laba operasional tahun lalu. Laba operasi dijadikan ukuran persistensi yang tinggi dikarenakan laba operasi merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. (Tri Junawatiningsih, 2014)

Menurut penelitian Afid Nurochman dan Badigantus Solikhah (2015) persistensi laba diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EPS_{jt} = \alpha + \beta EPS_{jt-1}$$

Keterangan:

EPS_{jt} = *Earning Per Share Tahun t*

EPS_{jt-1} = *Earning Per Share Tahun t-1*

α = *Konstanta*

β = *Persistensi Laba*

Menurut penelitian Satya Sarawar dan Nicken Destriana (2015) persistensi laba diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Earnings_{t+1} = \alpha + \beta_1 Earnings_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

$Earnings_{t+1}$ = laba operasi periode t+1 dibagi rata-rata asset

β_1 = ukuran persistensi

$Earnings_t$ = laba operasi periode t dibagi rata-rata asset

ε_t = error term

Laba operasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya laba positif karena penelitian ini tidak menggunakan variabel control yaitu *loss* seperti dalam penelitian Hsu dan Hu (2011). Nilai dari slope β_1 merupakan nilai dari persistensi laba. Semakin positif dan besar pada nilai β_1 , berarti laba sekarang semakin terpengaruh oleh laba masa lalu.

Sedangkan menurut Kormendi dan Lipe (1987) dalam penelitian Bitu Mashayekhi dan Mohammad S.Bazaz (2010) pengukuran persistensi laba menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{EARN}{TA_{i,t-1}} = \lambda_0 + \lambda_1 \frac{EARN}{TA_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

EARN = laba bersih perusahaan sebelum item luar biasa

TA = Awal tahun total asset

$\varepsilon_{i,t}$ = error dalam tahun t

λ_1 = persistensi

Penelitian ini melakukan estimasi *Ordinary Least Square* (OLS) pada model 1 untuk setiap tahun. Nilai estimasi λ_1 (selanjutnya disebut PERS) mendekati atau lebih dari satu (1) menunjukkan persistensi laba yang tinggi, sementara nilai mendekati nol (0) mencerminkan laba yang sangat sementara. Laba persisten lebih baik daripada laba *transitory* karena laba persisten lebih stabil dan dapat diprediksi di masa depan.

Adapun dalam penelitian Dodik Juliardi (2013) pengukuran laba persisten mengikuti pengukuran Kormendi dan Lipe (1987); Easton dan Zmijweski (1989). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$X_{it} = \alpha + \beta X_{it-1} + e$$

Keterangan:

X_{it} = Laba perusahaan i pada tahun t

X_{it-1} = Laba perusahaan i pada tahun t-1

α = Konstanta

β = Koefisien

Pada penelitian ini untuk pengukuran persistensi laba menggunakan laba operasional sebagai pengukuran laba yang persisten. Laba operasional dijadikan ukuran persistensi yang tinggi dikarenakan laba operasi merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, sehingga laba yang dianggap dapat memenuhi kriteria penilaian untuk persistensi laba suatu perusahaan. Berikut rumus untuk persistensi laba menurut Tri Junawatiningsih (2014) sebagai berikut:

$$PO = \beta_0 + \beta_1 PO_{t-1} + \varepsilon$$

Keterangan:

PO = Laba operasional perusahaan tahun t

β_1 = Koefisien regresi persistensi laba

ε = Residual error

PO_{t-1} = Laba operasional perusahaan tahun t-1

Pengukuran persistensi laba diprosikan dengan nilai koefisien regresi antara laba operasional periode sekarang dengan laba operasional periode yang lalu yang selanjutnya dikalikan dengan logaritma natural laba operasional tahun lalu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan merupakan informasi yang berpengaruh terhadap suatu pengambilan keputusan yang digunakan bagi pihak internal maupun eksternal. Terjadinya banyak kasus penyimpangan di perusahaan-perusahaan mencerminkan buruknya kualitas dari laporan keuangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk serta kualitas audit yang kurang baik.

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil pengujian dari para penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	I Made Sujana, Gerianta Wirawan Yasa dan I Dewa Nyoman Badera (2017)	Pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Institusional pada Persistensi Laba	Independen: Komite audit, kepemilikan institusional Dependen: Persistensi Laba	Komite audit berpengaruh negative terhadap persistensi laba Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap persistensi laba
2	Afid Nurochman dan Badingatus Solikhah (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Tingkat Hutang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba	Independen: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, tingkat hutang, ukuran perusahaan Dependen: Persistensi laba	Komite audit berpengaruh positif terhadap persistensi laba Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap persistensi laba

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Satya Sarawana dan Nicken Destriana (2015)	Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, Pendanaan hutang Perusahaan, Dividen serta Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba	<p>Independen: Kepemilikan tersentralisasi, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, keahlian keuangan anggota komite audit, keahlian tata kelola anggota komite audit, keahlian spesifik perusahaan anggota komite audit, ukuran perusahaan, pendanaan hutang, dividen</p> <p>Dependen: kualitas laba (diukur dengan persistensi laba)</p>	<p>independensi dewan komisaris dan keahlian tata kelola anggota komite audit berpengaruh positif terhadap persistensi laba</p> <p>Kepemilikan tersentralisasi, ukuran komite audit, keahlian keuangan anggota komite audit, keahlian spesifik perusahaan anggota komite audit, ukuran perusahaan, pendanaan hutang, dividen tidak berpengaruh terhadap persistensi laba</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
4	Tri Junawatiningsih (2014)	Analisis Pengaruh Mekanisme Internal dan Eksternal <i>Corporate Governance</i> terhadap Persistensi Laba	<p>Independen: Konsentrasi Kepemilikan, kepemilikan Institusional, Komite Audit, <i>Audit Tenure</i>, <i>Leverage</i>, Spesialis Industri Auditor</p> <p>Dependen: Persistensi Laba</p>	<p>Konsentrasi kepemilikan, komite audit, leverage dan spesialisasi auditor berpengaruh terhadap persistensi laba</p> <p>Kepemilikan institusional dan <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap persistensi laba</p>
5	Briliana Kusuma dan R. Arja Sadjiarto (2014)	Analisa Pengaruh Volatilitas Arus Kas, Volatilitas Penjualan, Tingkat Hutang, <i>Book Tax Grup</i> , dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Persistensi Laba	<p>Independen: volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, tingkat hutang, <i>book tax gap</i>, komposisi dewan komisaris, komite audit</p> <p>Dependen: persistensi laba</p>	<p>volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, <i>book tax gap</i>, komposisi dewan komisaris, komite audit berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba</p> <p>tingkat hutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persistensi laba</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
6	Redhwan Ahmed al- Dhamari and Ku Nor Izah Ismail (2013)	<i>Governance Structure, Ownership Structure and Earning Predictability : Malaysian Evidence</i>	Independen: <i>Borard independend, board size, board leadership, audit committee independence, the frequency of audit committee, the competency of the audit committee, institutional ownership. managerial ownership</i> Dependen : <i>earning predictability</i>	Kepemimpinan dewan dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap prediksi laba Dewan komisaris independen dan ukuran dewan berpengaruh signifikan negative terhadap prediksi laba Komite audit independen, frekuensi rapat komite audit, kompetensi komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi laba.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
7	Dodik Jualiardi (2013)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Konsentrasi Kepemilikan dan Kualitas Audit terhadap Nilai Perusahaan serta Laba Persisten (Studi Perbandingan antara Perusahaan Manufaktur yang diaudit KAP <i>Big 4</i> dan KAP non <i>Big 4</i>)	<p>Independen: <i>Leverage</i>, Konsentrasi Kepemilikan</p> <p>Dependen: Kualitas Audit, Nilai Perusahaan, Laba Persisten</p>	<p>Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan yang diaudit oleh KAP non <i>Big 4</i> dan sebaliknya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diaudit oleh KAP <i>Big 4</i></p> <p>Leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang diaudit oleh KAP <i>Big 4</i> maupun yang KAP non <i>Big 4</i></p> <p>Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan negative terhadap kualitas audit baik yang diaudit oleh KAP <i>Big 4</i> maupun KAP non <i>Big 4</i></p> <p>Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap laba persisten baik yang diaudit oleh KAP <i>Big 4</i> maupun KAP non <i>Big 4</i></p> <p>Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik yang diaudit oleh KAP <i>Big 4</i> maupun KAP non <i>Big 4</i></p> <p>Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap laba persisten yang diaudit oleh KAP <i>Big 4</i> sebaliknya berpengaruh signifikan negative terhadap laba persisten yang diaudit oleh KAP non <i>Big 4</i></p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
8	Qingyuan Li, Hongjian Wang, and Xin Rong (2013)	<i>Firm Earning Persistence over the Business Cycle : Evidence from Listed Companies in China</i>	<p>Independen: <i>Business Cycle, Auditing, Equity Ownership Concentration</i></p> <p>Dependen: <i>Firm Earning Persistence</i></p> <p>Kontrol: <i>Leverage, Size, Profitability, Market Value, KAP Big 4</i></p>	<p>Dibandingkan dengan persistensi laba dalam periode eskpansi, persistensi laba akan turun signifikan saat iklim ekonomi memburuk.</p> <p>Dibandingkan dengan persistensi laba yang diaudit KAP non <i>Big 4</i>, persistensi laba yang diaudit KAP <i>Big 4</i> lebih rentan terhadap siklus binis.</p> <p>Dibandingkan dengan persistensi laba denngan kepemilikan terkonsentrasi, persistensi laba dengan tingkat konsentrasi kepemilikan rendah lebih rentan terhadap siklus bisnis</p>
9	Muhammad Khafid (2012)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>) dan Struktur Kepemilikan terhadap Persistensi Laba	<p>Independen : Komposisi dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan konstitusional</p> <p>Dependen: Persistensi Laba</p>	<p>Komposisi dewan komisaris, komite audit berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba</p> <p>Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap persistensi laba</p> <p>Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap persistensi laba</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
10	Bitra Mashayekhi dan Mohammad S.Bazaz (2010)	<i>The Effects of Corporate Governance on Earnings Quality : Evidence from Iran</i>	<p>Independen: <i>Board size, board independen, board leadership, board meeting frequency</i></p> <p>Dependen: <i>Earning Quality (earning persistence, earning predictability, accrual quality proxies)</i></p>	<p>Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba (persistensi laba dan prediksi laba)</p> <p>Dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba (persistensi laba dan prediksi laba)</p> <p>Kepemimpinan dewan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba (persistensi laba, prediksi laba)</p> <p>Semua variabel <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laba yang diukur dengan proksi kualitas akrual.</p>

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian I Made Sujana, Gerianta Wirawan Yasa dan I Dewa Nyoman Badera (2017) untuk data sampel yang digunakan adalah Perusahaan manufaktur.
2. Penelitian Afid Nurochan dan Badigantus Solikhah (2015) untuk perbedaan variabel independen yang digunakan adalah tingkat hutang dan

ukuran perusahaan selain itu untuk data sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan.

3. Penelitian Satya Sarawarna dan Nicken Destriana (2015) untuk perbedaan variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan tersentralisasi, keahlian tata kelola anggota komite audit, keahlian spesifik perusahaan anggota komite audit, ukuran perusahaan, pendanaan utang dan dividen. Selain itu, untuk data sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan non keuangan.
4. Penelitian Tri Junawatiningsih dan Puji Harto (2014) untuk perbedaan variabel independen yang digunakan adalah konsentrasi kepemilikan, *audit tenure*, *leverage* dan spesialis industri auditor. Selain itu, untuk data sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur.
5. Penelitian Briliana Kusuma dan R. Arja Sadjiarto (2014) untuk perbedaan variabel independen yang digunakan adalah volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, volatilitas penjualan, tingkat hutang, *book tax grup*. Selain itu, untuk data sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur.
6. Penelitian Redhwan Ahmed al-Dhamari and Ku Nor Izah Ismail (2013) untuk perbedaan variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan, kepemimpinan dewan, frekuensi rapat komite audit, kompetensi komite audit. Selain itu untuk data sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia.

7. Penelitian Dodik Jualiardi (2013) untuk perbedaan variabel independen yang digunakan adalah konsentrasi kepemilikan dan untuk perbedaan variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan serta kualitas audit. Selain itu untuk data sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur.
8. Penelitian Qingyuan Li, Hongjian Wang dan Xin Rong (2013) untuk perbedaan variabel independen yang digunakan adalah *business cycle*, *auditing*, dan *equity ownership concentration* serta adanya variabel control yang digunakan yaitu *leverage*, *size*, *profitability*, *market value* dan KAP *Big 4*. Selain itu untuk data sampel yang digunakan adalah perusahaan yang listing di China.
9. Penelitian Muhammad Khafid (2012) untuk perbedaan yaitu data sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
10. Penelitian Bitu Mashayekhi dan Mohammad S Bazaz (2010) untuk perbedaan variabel independen yang digunakan yaitu ukuran dewan komisaris, kepemimpinan dewan, dan frekuensi rapat dewan serta untuk perbedaan variabel dependen yang digunakan adalah prediksi laba dan kualitas akrual.

2.2.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris terhadap Persistensi Laba

Dewan komisaris independen merupakan salah satu bagian terpenting dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Komposisi dewan komisaris dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan penyajian informasi yang diberikan

perusahaan, apakah informasi tersebut telah dimodifikasi atau memang murni apa adanya. Dewan komisaris merupakan salah satu pengelola perusahaan yang memiliki peran penting bagi aktivitas perusahaan termasuk pelaporan keuangan. Dan hal ini akan berpengaruh pada tingkat persistensi laba perusahaan, dengan semakin kecil kemungkinan dilakukan modifikasi penyajian laporan keuangan, yang berarti akan membuat laba perusahaan persisten. Dan sebaliknya dengan semakin kecilnya jumlah dewan komisaris, akan mempermudah para pengelola perusahaan tersebut menyatukan pikiran untuk manipulasi informasi pada laporan keuangan yang dapat menyebabkan tingkat persistensi laba perusahaan rendah (Briliana Kusuma dan R. Arja Sadjiarto (2014).

Menurut hasil penelitian Briliana Kusuma dan R Arja Sadjiarto (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba dan dewan komisaris memiliki koefisien regresi bertanda positif, maka akan dikatakan bahwa apabila komposisi dewan komisaris mengalami kenaikan 1 (satu), maka persistensi laba akan mengalami kenaikan sebesar 0,565. Sebaliknya, apabila komposisi dewan komisaris mengalami penurunan sebesar 1 (satu), maka persistensi laba akan mengalami penurunan sebesar 0,565. Kondisi ini terjadi dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap dan konstan.

Menurut hasil penelitian Satya Sarawana dan Nicken Destriana (2015) menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Laba akan semakin persisten pada perusahaan dewan dewan independen lebih banyak. Hal ini mungkin terjadi karena komisaris independen tidak mengutamakan kepentingan pihak-pihak tertentu serta mengawasi proses

pelaporan keuangan agar lebih baik. Selain itu hal ini mungkin dikarenakan fungsi pengawasan dewan memproteksi pemegang saham dengan mencegah manajemen untuk memanipulasi angka laba, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas laba.

Sama halnya dengan hasil penelitian Muhammad Khafid (2012) menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap persistensi laba. Hal ini membuktikan bahwa independensi dewan komisaris sangat efektif di dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam hal pelaporan keuangan pada umumnya dan pelaporan laba pada khususnya.

Adapaun penelitian menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap persistensi laba. Hasil ini menunjukkan bahwa teori agensi tentang hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan kualitas laporan keuangan dan karenanya kualitas laba juga berlaku di lingkungan bisnis di Iran.

Namun berbeda dengan hasil penelitian Afid Nurocman dan Badigantus Solikhah (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sylvia dan Sidharta (2005) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Rata-rata dewan komisaris independen 58,18%, artinya penerapan kebijakan standar minimal dewan komisaris independen 30% telah terpenuhi hal ini disimpulkan bahwa

pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sampai pada pemahaman penulis bahwa komposisi dewan komisaris independen yang lebih besar dapat berpengaruh terhadap persistensi laba. Terlihat peran dewan komisaris independen dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam penyajian laporan keuangan, serta tidak mengutamakan kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga diharapkan laporan keuangan yang disajikan tanpa ada manipulasi laba serta mengurangi biaya agensi, yang mengakibatkan menaikkan kualitas laba serta menjadikan laba yang persisten.

2.2.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Persistensi Laba

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan laba dari periode ke periode (laba yang persisten).

Hasil penelitian oleh Afid Nurocman dan Badigantus Solikhah (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Hasil dari analisis menunjukkan rata-rata perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan standar minimal jumlah komite audit yaitu sebanyak tiga (3) orang. Salah satu tugas utama komite audit adalah memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Sehingga, karena

dengan adanya pengawasan oleh komite audit ini membuat manajer lebih cenderung meningkatkan kinerjanya daripada harus melakukan manipulasi laba. Akibatnya pengawasan yang dilakukan kinerja manajer untuk menghasilkan laba yang persisten.

Komite audit yang merupakan pengelola perusahaan, dapat memodifikasi laporan keuangan. Karena komite audit yang bersentuhan langsung dengan proses pemeriksaan laporan keuangan serta memiliki posisi yang cukup memegang andil, komite audit juga berpotensi untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri. Semakin sedikit komite audit, maka kemungkinan untuk menyatukan pendapat untuk memodifikasi laporan keuangan akan semakin besar. Hal ini berarti, semakin sedikit jumlah komite audit perusahaan, maka semakin kecil persistensi laba perusahaan tersebut. Sebaliknya, bila anggota komite audit dari banyak anggota, maka semakin sulit untuk mencapai kesepakatan untuk memodifikasi laporan keuangan. Hal ini dapat memicu laba perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan memiliki persistensi yang baik (Briliana Kusuma dan R.Arja Sadjarto (2014).

Hasil penelitian Briliama Kusuma dan R.Arja Sadiar (2014), bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba dan apabila komite audit mengalami kenaikan sebesar 1 (satu), maka persistensi laba akan mengalami kenaikan sebesar 0,053. Sebaliknya jika komite audit mengalami penurunan sebesar 1 (satu) maka persistensi laba juga akan mengalami penurunan sebesar 0,053. Kondisi ini dengan asumsi variabel lainnya adalah tetap dan koefisien.

Adapun menurut hasil penelitian Tri Junawatiningsih dan Puji Harto (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap persistensi laba. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besarnya peran komite audit berdampak pada semakin besarnya persistensi laba.

Hal yang sama dalam penelitian Muhammad Khafid (2012) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba. Artinya semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin tinggi kualitas laba (berdampak menjadi laba yang persisten) yang dilaporkan.

Namun berbeda dengan hasil penelitian Satya Sarawana dan Nicken Destriana (2015) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap persistensi laba, atau dapat dikatakan bahwa ukuran komite audit tidak menginformasikan mengenai persistensi laba masa depan (kualitas laba). Hal ini mungkin karena besar kecilnya jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kegiatan pengawasan yang dilakukan komite audit, sehingga tidak berdampak pada persistensi atas laba yang dihasilkan. Selain itu komite audit yang terlalu besar akan sulit dikoordinasikan dan komite dengan anggota yang kecil akan kurang efektif sebagaimana yang dinyatakan KNKG bahwa ukuran komite audit yang efektif adalah 3 (tiga) - 5 (lima) anggota.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sampai pada pemahaman penulis bahwa komite audit memegang peranan penting dalam mendampingi dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Dengan adanya komite audit sebagai pengawasan dan

pengendalian internal diharapkan mampu menghambat perilaku manajemen yang akan melakukan tindakan yang mengakibatkan buruknya kinerja perusahaan, akan tetapi dengan adanya komite audit yang lebih banyak dapat terciptanya proses pelaporan keuangan yang relevan dan handal menjadikan informasi laba yang persisten.

2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Persistensi Laba

Kepemilikan institusional merupakan salah satu pengukuran *good corporate governance*. Kepemilikan institusional mempunyai peran dalam pengawasan kinerja perusahaan. Menurut Bushee (1998) dalam Afid Nurochman dan Badingatus Solikhah (2015), kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, agar motivasi manajer dalam menghasilkan laba daripada memanipulasi laba. Hal ini berarti semakin besar jumlah kepemilikan institusional akan semakin meningkatkan persistensi laba.

Pemilik saham institusional juga dapat mempengaruhi perusahaan dengan cara berbeda, misalnya dengan tekanan terhadap isu dan aktifitas tertentu untuk mengendalikan proses keputusan internal melalui keanggotaan dewan direksi perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan diantaranya memiliki informasi yang lebih luas dibandingkan kepemilikan individu. Informasi yang luas

didapatkan kepemilikan institusional dari pengalaman bisnis dalam bidang keuangan yang ditekuni. (Tri Junawatiningsih dan Puji Harto, 2014).

Pengalaman dan informasi luas yang dimiliki kepemilikan konstitusional menjadikan beban kepada manajer perusahaan dalam menyampaikan informasi laba yang handal dan relevan. Manajer perusahaan melaporkan informasi yang handal dan relevan agar citra nama baik perusahaan tetap terjaga. Relevansi dan keandalan dari laporan keuangan menjadikan informasi laba dapat memberikan nilai prediksi di masa depan sehingga akan tercipta laba yang persisten. (Tri Junawatiningsih dan Puji Harto, 2014).

Hasil penelitian I Made Sujana, dkk (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap persistensi laba. Hasil ini mengandung arti bahwa semakin jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham institusi, maka persistensi laba akan cenderung meningkat, karena kekuasaan yang dimiliki pemegang saham konstitusi semakin tinggi dan mereka dapat melakukan monitoring dengan lebih baik sehingga semakin tinggi kualitas laba yang dilaporkan. Selain itu dengan semakin besar kepemilikan institusional, maka akan dapat mengurangi terjadinya konflik antara kreditur dengan manajer, dan akhirnya dapat menekan biaya keagenan.

Berbeda dengan hasil penelitian Afid Nurochman & Badigantus Solikhah (2015) menunjukkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship*. Teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk

menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldsin & Davis, 1997).

Sama halnya dengan hasil penelitian Tri Junawatiningsih dan Puji Harto (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap persistensi laba dikarenakan tekanan untuk mendapatkan target menjadikan manajer perusahaan memberikan informasi laba yang tidak sesuai dengan sebenarnya (*reliability*). Kepemilikan institusional akan membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba dari investor, sehingga mereka akan tetap memiliki kecenderungan untuk memanipulasi laba. Tindakan manipulasi laba akan berakibat buruknya kualitas dari laba sehingga informasi laba tidak dapat memberikan nilai prediksi di masa mendatang. Buruknya nilai prediksi ini akhirnya membuat laba menjadi tidak persisten.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sampai pada pemahaman penulis bahwa kepemilikan institusional memiliki informasi yang luas serta kekuasaan yang dapat memonitoring manajemen untuk melaporkan keuangan dan mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri. Sehingga laporan keuangan yang disajikan relevan dan handal yang berisikan informasi laba yang berkualitas dan persisten.

2.2.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Persistensi Laba

Jensen dan Meckling (1976) dalam Afid Nurochman dan Badigantus Solikhah (2015) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi *agency cost*

adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajer dengan para pemegang saham, sehingga manajer akan lebih meningkatkan kinerja perusahaan melalui perolehan laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajer yang mempunyai kepentingan yang sama sebagai pemegang saham, sehingga semakin meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba yang persisten.

Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap persistensi laba (Muhammad Khafid, 2012). Kepemilikan dapat meningkatkan kualitas laba termasuk di dalamnya persistensi laba selaras dengan *alignment of interest hypothesis*. Berdasarkan *alignment of interest hypothesis*, kepemilikan wajib bagi dewan direksi dan manajemen dapat secara efektif memotivasi kinerja manajer. Hal ini juga dapat menciptakan keinginan bagi direktur untuk lebih dekat memonitor para manajer. Dewan direksi yang memiliki sedikit modal saham di perusahaan tidak dapat efektif memonitor dan mendisiplinkan para manajer. Bahkan, perusahaan yang meminta direksi untuk meningkatkan saham di perusahaan mereka (Hambrick dan Jackson, 2000 dalam Muhammad Khafid 2012).

Hasil penelitian Afid Nurochman dan Badigantus Solikhah (2015) bahwa kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank. Hasil ini mendukung teori *agency*, yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat kepemilikan saham oleh mengakibatkan kurangnya pihak manajer yang merasa memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham sehingga laba yang dihasilkan perusahaan kurang persisten karena tingginya tingkat

kemungkinan manajer untuk melakukan manipulasi angka-angka akuntansi (Jensen dan Meckling, 1976).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sampai pada pemahaman penulis bahwa kepemilikan manajerial yang merupakan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen seperti kepemilikan dewan direksi merupakan hal yang dapat berguna untuk sebagai monitoring dan mendisiplinkan para manajer apabila saham yang dimiliki oleh manajerial lebih banyak, hal ini berdampak pada pelaporan keuangan yang sesuai sehingga informasi laba yang tersaji berkualitas dan konsisten.

2.2.6 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Persistensi Laba

Akuntan publik sebagai auditor eksternal yang independen yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Selain itu, ukuran auditor juga merupakan informasi yang paling mudah dilihat pasar. Informasi mengenai ukuran auditor ini tersedia secara public. Auditor yang berukuran besar biasanya dipandang memiliki kualitas audit yang lebih tinggi karena beberapa faktor, diantaranya: independensi yang lebih baik, keahlian yang lebih tinggi, dan juga sumber daya manusia dan modal yang lebih baik. Semakin besar suatu auditor atau Kantor Akuntan Publik, semakin besar sumber daya yang dimiliki dan semakin besar juga keahlian serta independensi yang dimiliki (Francis, 2007 dalam Erni Marsella, 2012). Berdasarkan

pejelasan tersebut, sampai pada pemahaman penulis ukuran auditor merupakan salah satu ukuran yang baik dalam mengukur kualitas audit.

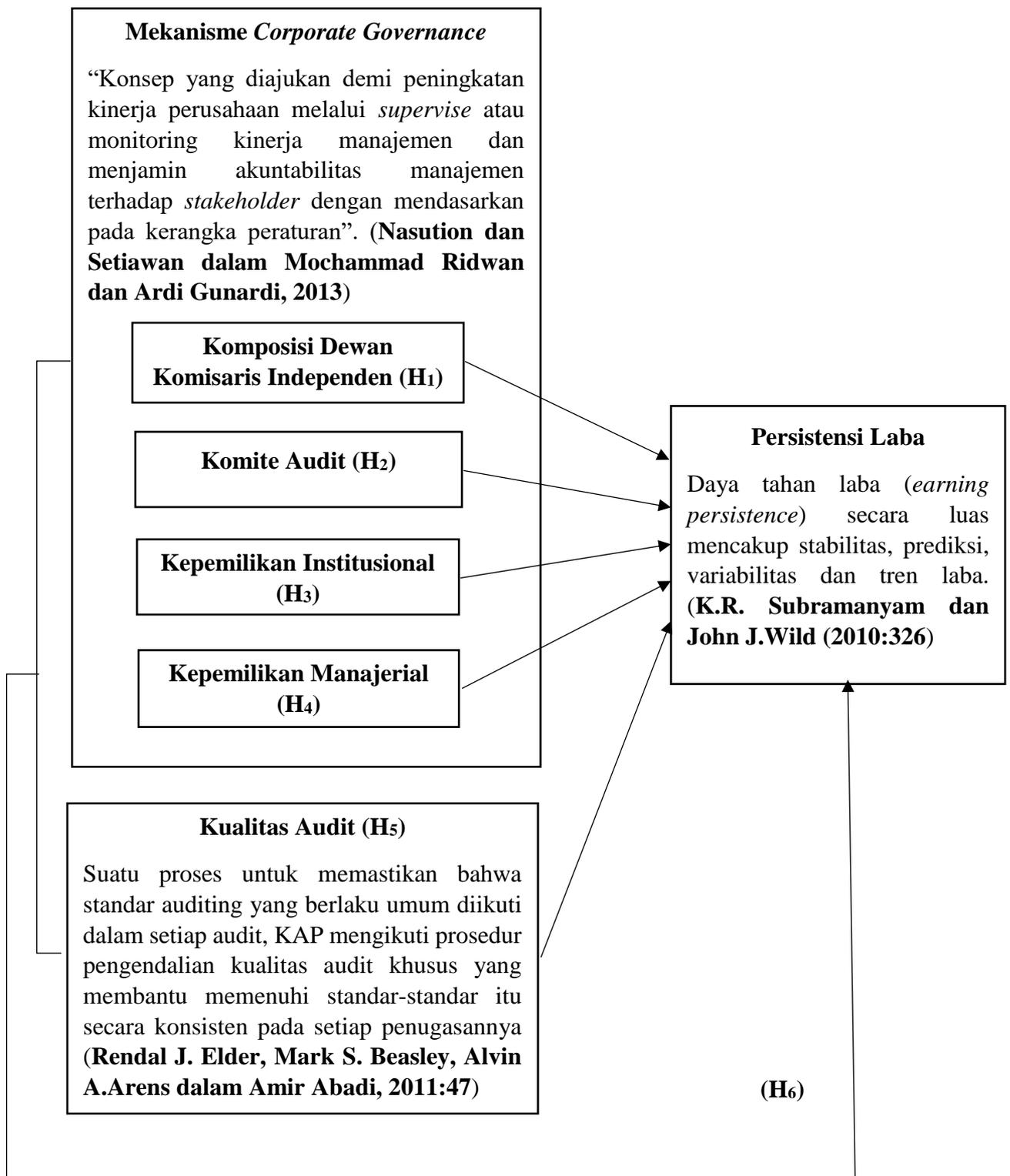
DeAngelo (1981) berpendapat bahwa KAP internasional yang besar relative ukurannya besar dan memiliki kemampuan teknologi yang lebih baik, mereka kurang bergantung pada pelanggan, memiliki reputasi yang lebih besar dan memiliki motivasi lebih serta kemampuan teknologi untuk menjamin kualitas auditing guna mempertahankan reputasi mereka, sehingga memastikan bahwa kualitas informasi akuntansi klien mereka lebih tinggi. Becker *et.al* (1998), Francis *et al.* (1999), dan Reynolds dan Francis (2000) menemukan bahwa klien AS dari *Big 4* melaporkan *discretionary accruals* yang rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh klien auditor non *Big 4*. Zhang (2005) berpendapat bahwa laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang diaudit oleh *Big 4* memiliki kredibilitas lebih, dan ini konsisten dengan temuan Wang dan Chen (2006) bahwa *Big 4* memang memberikan audit yang lebih kualitas tinggi di China. Akibatnya, dari sudut pandang kualitas audit dan laba dari perusahaan yang diaudit oleh *Big 4* lebih sulit bagi para manajer untuk memanipulasi dan dengan demikian sesuai hasil penelitian Qingyuan Li, *et.al* (2013) bahwa persistensi laba yang laporannya diaudit *Big 4* lebih rentan terhadap siklus bisnis dibandingkan dengan yang diaudit oleh non *Big 4*.

Namun berbeda dengan hasil penelitian Dodik Juliardi (2013) kualitas audit berpengaruh signifikan dengan arah negative terhadap laba persisten ketika perusahaan tersebut diaudit oleh KAP non *Big 4* sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap laba persisten ketika perusahaan tersebut diaudit oleh KAP

Big 4. Hasil pertama untuk perusahaan yang diaudit KAP *Big 4* bermakna bahwa tujuan auditor dalam menjalankan audit adalah untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan emiten pasar modal dengan standar akuntansi keuangan. Dalam menjalankan penugasannya auditor memberikan toleransi kepada kliennya atas pemilihan penggunaan kebijakan akuntansi yang digunakan sepanjang kebijakan tersebut diperbolehkan oleh PABU (Prinsip Akuntansi yang berlaku umum), maka auditor tidak mempermasalahkannya. Dengan adanya toleransi ini maka auditor sebagai penghasil laporan keuangan yang *audited* bukanlah sebagai penentu dalam memutuskan apakah laba yang dihasilkan klien mempunyai persistensi laba yang kuat atau lemah. Hasil temuan yang kedua untuk perusahaan yang diaudit KAP non *Big 4* menunjukkan bahwa semakin meningkat kualitas audit, semakin rendah laba persisten. Hal ini bermakna bahwa KAP non *Big 4* justru lebih mempunyai peranan bagi perusahaan-perusahaan karena ada campur tangan terhadap pengakuan laba sebagai penghasilan usaha normal usaha atau tidak termasuk.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan membuat paradigma pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H1. Komposisi dewan komisaris independe berpengaruh positif terhadap persistensi laba.

H2. Komite audit berpengaruh positif terhadap persistensi laba

H3. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap persistensi laba

H4. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap persistensi laba

H5. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap persistensi laba.

H6. Mekanisme *corporate governance* dan kualitas audit berpengaruh terhadap persistensi laba.